

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Deskripsi Konseptual

Deskripsi konseptual adalah penjelasan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian secara sistematis dan mengkaji teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual, definisi operasional dan hipotesis.

2.2 Teori Terkait Penelitian

2.2.1 Teori Manajemen Kinerja (*Performance Management Theory*)

Teori Manajemen Kinerja (*Performance Management Theory*) adalah suatu proses kinerja dari sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus menerus yang dikembangkan oleh Baird pada tahun 1986. Pada dasarnya tujuan manajemen kinerja adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik agar mampu melaksanakan pekerjaan dengan kualitas terbaik secara efektif dan efisien (Nankervis, 2006).

Teori Manajemen Kinerja (*Performance Management Theory*) menyoroti pentingnya mengukur dan memantau kinerja suatu organisasi dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur sebagai pembinaan kepada setiap individu atau tim untuk mencapai tujuan mereka (Lubis, 2020).

Hubungan Teori Manajemen Kinerja (*Performance Management Theory*) dengan penelitian ini yaitu adanya penyusunan strategi yang dibuat dengan sistem manajemen kinerja dalam anggaran yang dibagi menjadi 5 tahap yaitu

menyusun rencana setrategi, menyusun rencana kerja, melakukan evaluasi, penilaian kinerja, monitoring dan evaluasi (Widhiyanti & Pasaribu, 2020).

Dengan adanya perencanaan yang merupakan kegiatan pengambilan kebijakan yang kemudian diimplementasikan sebagai bentuk anggaran yang memuat tentang biaya yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun dalam memperoleh pendapatan untuk membiayai rencana tersebut. Tujuan utama penyusunan anggaran adalah menyediakan informasi kepada pihak manajemen dalam mengambil keputusan.

Maka penyerapan anggaran adalah bagaimana proses pembelanjaan dana yang telah dialokasikan untuk program dan kegiatan tertentu yang dimulai dari awal perencanaan sampai dengan realisasi belanja. Penyerapan anggaran yang efektif penting untuk memastikan bahwa organisasi memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara maksimal untuk mencapai tujuannya.

2.2.2 Value For Money Theory

Menurut Erawan dkk, (2019) *Value for Money* merupakan sebuah konsep mengenai pengelolaan organisasi sektor publik dengan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1. Ekonomi terkait analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi merupakan perbandingan output input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah menunjukkan efisiensi.

3. Efektivitas tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi lembaga yang tertuang dalam strategik planning suatu lembaga maka Value for money yang dijalankan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah harus dijalankan dengan sistem akuntansi yang baik.

Manfaat *Value for Money* berdasarkan sumber Portal Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dapat dilihat dengan mengunjungi situs <https://kpbu.kemenkeu.go.id/> diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik antara lain sebagai berikut ini.

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik bukan golongan atau kelompok tertentu.

2.3 Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik merupakan organisasi pemerintahan yang memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerjanya dan bertanggungjawab atas pelayanan dan dana yang dikelola sesuai dengan anggaran yang disediakan. Akuntansi sektor publik berhubungan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi di ranah publik. yang dimaksud akuntansi sektor publik adalah suatu alat informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah sebagai penggunaan

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran organisasi (Rahmawati dan Ishak, 2020).

2.4 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan pernyataan yang berhubungan dengan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu tertentu yang diterangkan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau cara dalam mempersiapkan anggaran. Menurut Ayu dkk, (2020) penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahap yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran sektor publik yaitu instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program – program yang dibiayai dengan uang publik.

Menurut Israr dan Syofyan, (2022) anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah proses untuk mengembangkan pengukuran kinerja operasi, layanan dan program pemerintah ke dalam proses anggaran, yang dimaksudkan untuk menggerakkan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil.

Menurut Wongkar dkk, (2021) definisi anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara anggaran (input) dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut yang berkaitan dengan visi, misi dan rencana strategi organisasi”. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan

fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, dimana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya (Maulina dan Abdullah, 2019).

Menurut Israr dan Syofyan (2022) anggaran berbasis kinerja memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja publik dengan menghubungkan pendanaan organisasi sektor publik dengan hasil yang akan dicapai melalui informasi kinerja yang sistematis. Penerapan anggaran berbasis kinerja dibentuk melalui tahapan siklus anggaran sesuai dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu, dimulai dari perencanaan anggaran, implementasi anggaran, pelaporan/pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi kinerja.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan kepada bawahannya dalam melaksanakan program kerjanya. Anggaran pada instansi pemerintahan selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan anggaran sebagai gambaran tentang kinerja instansi pemerintah.

2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Penyerapan Anggaran Pada Satker Pemerintahan Kabupaten Kaur

2.5.1 Komitmen Organisasi

Menurut Utama dan Hidajat, (2022) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah stimulus dari diri seseorang agar melakukan sesuatu untuk dapat mendukung kesuksesan suatu organisasi sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan lebih mendahulukan urusan organisasi. Komitmen seseorang muncul dari dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut merasa bahwa pegawai harus mampu hal yang terbaik dan dapat terus terlibat secara aktif dalam suatu organisasi. Perlunya melibatkan suatu interaksi yang aktif dengan organisasi yang dilakukan oleh seseorang demi kesuksesan suatu organisasi. Jika suatu organisasi mempunyai pegawai yang telah berkomitmen tinggi terhadap organisasi maka tingkat pergerakan dan perpindahan pegawai akan semakin rendah. Namun apabila komitmen yang rendah maka akan berdampak terhadap rendahnya kualitas sumber daya yang ada (Gani dkk, 2022).

Secara umum, komitmen organisasi dapat dipahami sebagai keterikatan karyawan secara psikologis terhadap organisasi dengan konsep komitmen organisasi adanya keyakinan dan keberterimaan terhadap tujuan dan sasaran organisasi, adanya keinginan (*swillingnes*) untuk bekerja keras atas nama organisasi, dan adanya upaya untuk tetap berada dalam organisasi (Nasih, 2018).

Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas individu terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi. Komitmen

organisasi yang kuat akan mendorong individu untuk berusaha dalam mencapai tujuan atau target organisasi, sehingga komitmen organisasi juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana individu tersebut peduli terhadap keanggotaannya, serta berpikiran positif dan berusaha untuk melakukan yang terbaik semaksimal mungkin bagi organisasinya (Kristianingsih dkk, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu keyakinan yang dimiliki individu dengan mengutamakan kepentingan organisasi dengan memberikan kontribusi yang besar untuk mencapai terwujudnya tujuan organisasi.

2.5.2 Indikator Komitmen Organisasi

Menurut Gani dkk, (2022) terdapat indikator komitmen organisasi sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen Puncak atau gaya kepemimpinan yang merupakan bentuk dukungan dari pimpinan kepada pegawai dengan menyediakan fasilitas dan mendukung setiap aktivitas dalam mengsucceskan program yang sedang dijalankan.
2. Kapasitas SDM yang berorientasi pada kemampuan yang akan menentukan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan secara optimal.
3. Sistem dan Prosedur yang disusun secara rinci guna untuk memaksimalkan waktu kerja dengan tujuan program yang dijalankan.
4. Budaya Organisasi yang menunjukkan integrasi yang dimiliki anggota dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan nilai-nilai, norma dan sikap.

2.5.3 Perencanaan Anggaran

Menurut penelitian Kuntadi dan Adi Nugroho, (2023) perencanaan anggaran merupakan dukungan anggaran yang dipengaruhi oleh aturan, anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia, dan pembelian barang dan jasa. Perencanaan anggaran merupakan sebuah proses antara tujuan dan realisasi dengan menjadi kompas yang mengarahkan seluruh proses perencanaan yang matang dan terstruktur.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa yang akan datang, sehingga penting dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan. Perencanaan ialah suatu proses penentuan tujuan organisasi yang kemudian menyajikannya dengan jelas taktik-taktik, strategi-strategi serta juga operasi yang diperlukan untuk dapat/bisa mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh (Renoat dan Latupeirissa, 2019).

Perencanaan anggaran merupakan otak yang merumuskan strategi dan langkah-langkah taktis dalam tahap analisis kebutuhan, identifikasi risiko, dan prioritas program utama. Ketentuan dan regulasi yang berlaku memastikan kepatuhan dan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kemudian anggaran juga bertindak sebagai peta jalan, menjabarkan target dan alokasi dana secara terperinci. Anggaran yang realistis dan terukur menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Anisa, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran merupakan kegiatan yang melakukan penyusunan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan

yang berlaku. Proses perencanaan anggaran menjadi awalan memungkinkan penyerapan mengenai belanja daerah untuk penyediaan dana layanan publik.

2.5.4 Indikator perencanaan anggaran

Menurut Salwah, (2019) menyatakan indikator perencanaan anggaran sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Umum Akuntansi (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah sesuai dengan rencana strategi SKPD, Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD).
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD.
3. Kesesuaian program kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan standar harga barang dan jasa.
4. Kesesuaian APBD yang ditetapkan dengan RKA SKPD yang diusulkan.

2.5.5 Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Rahmi Ramadhani dkk, (2023) sistem pengendalian internal organisasi adalah proses yang mengendalikan praktik akuntansi untuk memenuhi tujuan pengendalian internal, pelaporan, dan pemantauan. Mekanisme pengendalian internal yang dimaksud dapat memfasilitasi pemahaman tentang batasan dan hak yang terkait dengan pekerjaan, serta teknologi informasi yang digunakan, oleh departemen sumber daya manusia.

Sedangkan menurut Rahmi Ramadhani dkk, (2023) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk tindakan

penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan.

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan proses pada suatu organisasi untuk melakukan penetapan kebijakan dan prosedur organisasi dalam mengecek ketelitian, keakurasian serta efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi.

2.5.6 Indikator Sistem Pengendalian Internal

Menurut Rahmi Ramadhani dkk, (2023) menyatakan bahwa ada 4 indikator pengendalian internal, yaitu :

1. Struktur organisasi yang merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokoknya.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang merupakan tanggung jawab perlindungan yang cukup oleh pejabat yang menyetujui terjadinya transaksi terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban.
3. Praktik yang sehat yaitu melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan yang memiliki mutu sesuai dengan tanggung jawabnya.

2.5.7 Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Weni Febriani dkk, (2023) pengadaan barang dan jasa merupakan proses penggunaan anggaran yang sudah dijadwalkan secara terencana dalam

pemanfaatan anggaran dengan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Pengadaan barang/jasa dapat mempengaruhi daya serap anggaran pemerintah, apabila semakin tinggi pengadaan barang/jasa maka semakin besar pula kemampuan untuk menyerap anggaran. Sebaliknya, semakin sedikit pengadaan barang/jasa, semakin sedikit anggaran yang diserap. Keterlambatan pengadaan barang/jasa dikarenakan adanya kekurangan pegawai bersertifikat dan lam sbatnya jadwal lelang sehingga mempengaruhi proses penyerapan anggaran (Kuntadi dan Adi Nugroho, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari anggaran belanja yang sangat penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Dan anggaran belanja digunakan sebagai alat kebijakan di bidang fiskal disamping fungsinya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah. Belanja pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa ini secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan kegiatan kerja dan pembangunan ekonomi.

2.5.8 Indikator Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Ani, (2020) menyatakan indikator pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :

1. Kepatuhan hukum adanya proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Transparansi proses pengadaan bersifat transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait.

3. Efisiensi waktu yang dibutuhkan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target yang ditetapkan.
4. Pengadaan berkelanjutan yang dirancang untuk mendukung prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial organisasi.

2.5.9 Efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan evaluasi sejauh mana anggaran digunakan untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan sehingga penerapan anggaran mempengaruhi seberapa banyak uang yang digunakan (Kuntadi dan Adi Nugroho, 2023). Penerapan anggaran berbasis kinerja harus didasarkan dengan adanya anggaran yang sesuai baik dari segi jumlah uang dan rentang waktu. Penerapan anggaran dapat dilihat dengan adanya sejumlah uang yang dikeluarkan dengan adanya hasil dari dana tersebut baik barang maupun jasa.

2.5.10 Indikator efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja

Menurut Kuntadi dan Velayati, (2022) menyatakan indikator penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai berikut :

1. Output dan outcome yang menilai hasil atau dampak yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan anggaran.
2. Capaian kinerja yang mengukur sejauh mana organisasi atau proyek mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran.
3. Pencapaian sasaran strategis yang menilai sejauh mana penggunaan anggarannya mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

2.5.11 Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintahan dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah maka akan memudahkan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah terseret secara maksimal. Namun apabila pengadaan barang dan jasa yang dilakukan lambat terrealisasi maka akan memiliki dampak lambatnya penyerapan perekonomian daerah yang berakibat keterlambatan atas manfaat yang akan dimiliki oleh masyarakat (Salwah, 2019).

Menurut Rahmawati dan Ishak, (2020) penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyerapan anggaran yang rendah bukan merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan kinerja keuangan pemerintah daerah, namun pemerintah daerah tetap harus menaruh perhatian terhadap ini. Apabila hal ini terus terjadi, dapat dipastikan target kinerja yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan ini berarti ada uang pemerintah daerah yang menganggur yang seharusnya dapat diinvestasikan pada tempat-tempat yang lebih produktif.

Dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang telah direncanakannya. Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi penyerapan anggaran sesuai dengan

hasil pekerjaan yang dapat diselesaikan, dengan anggapan bahwa hasil pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang direncanakan.

2.5.12 Indikator Penyerapan Anggaran

Indikator yang digunakan dalam serapan anggaran menurut Salwah, (2019) adalah persentase realisasi terhadap belanja pada masing-masing SKPD.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi pada penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di ringkas ke dalam Tabel 2.1.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Pelulis	Hasil
1.	Pengaruh Komitmen, Sumber Daya Manajemen, Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan	Gani dkk (2022)	Komitmen organisasi, sumber daya manajemen, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2.	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kabupaten	Ismid dkk (2020)	Komitmen organisasi berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja.
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran: Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Serta Partisipasi Anggaran	Kuntadi dan Adi Nugroho (2023)	Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

No	Judul	Pelulis	Hasil
4.	Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik	Taufik (2013)	Sistem pengendalian intern berpengaruh langsung terhadap kinerja sektor publik. Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Sektor Publik
5.	Pengaruh Perencanaan Anggaran Dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kota Banda Aceh	(Salwah, 2019)	Secara parsial hanya variable pelaksanaan anggaran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerpan. Sedangkan secara bersama-sama Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran SKPD.
6.	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Grobogan)	(Nawastri, 2015)	Penggunaan anggaran, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja sedangkan orientasi tujuan dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja.

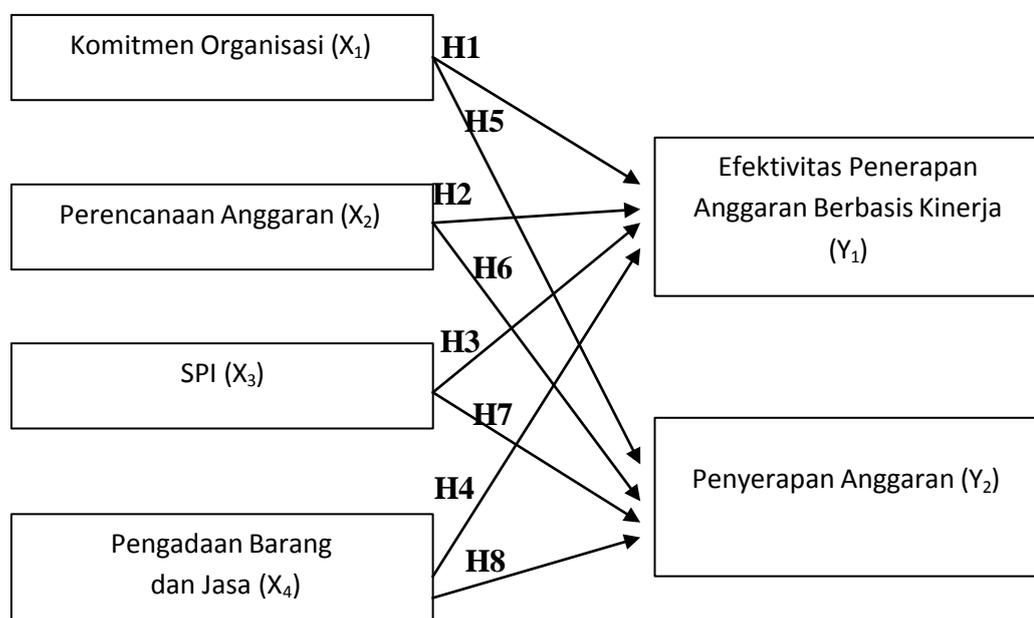
Sumber : Beberapa Jurnal Terdahulu

2.7 Kerangka Konseptual

Peneliti membuat kerangka konseptual ini dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dan mempermudah mengarahkan peneliti agar dengan cepat dalam mengukur penelitian yang dilakukan. Berdasarkan Teori maka dari itu dapat dilihat kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah Komitmen Organisasi (X_1), Perencanaan Anggaran (X_2), Sistem Pengendalian Internal (X_3), Pengadaan Barang dan Jasa (X_4), Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Y_1) dan Penyerapan Anggaran (Y_2). Variabel-variabel tersebut akan dianalisis dalam penelitian sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh masing-masing

variabel tersebut dapat mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja dan penyerapan anggaran. Lebih jelasnya peneliti membuat kerangka penelitian pada Gambar 2.1

Gambar 2. 1
Kerangka Penelitian



Keterangan :

—————→ : Pengaruh Langsung

2.8 Definisi Oprasional

Adapun definisi operasional dan Alat ukur masing-masing variabel dalam penelitian ini mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja dan penyerapan anggaran pada satker

pemerintahan Kabupaten Kaur. Berikut definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut yang akan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Definisi Oprasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1.	Komitmen Organisasi	Komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas individu terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam suatu organisasi. Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu untuk berusaha dalam mencapai tujuan atau target organisasi, sehingga komitmen organisasi juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana individu tersebut peduli terhadap keanggotaannya, serta berpikiran positif dan berusaha untuk melakukan yang terbaik semaksimal mungkin bagi organisasinya (Kristianingsih dkk 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Manajemen Puncak yang merupakan bentuk dukungan dari pimpinan kepada pegawai dengan menyediakan fasilitas dan mendukung setiap aktivitas dalam mengsucceskan program yang sedang dijalankan. 2. Kapasitas SDM yang berorientasi pada kemampuan yang akan menentukan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan secara optimal. 3. Sistem dan Prosedur yang disusun secara rinci guna untuk memaksimalkan waktu kerja dengan tujuan program yang dijalankan. 4. Budaya Organisasi yang menunjukkan integrasi yang dimiliki anggota dalam melakukan pekerjaannya berdasarkan nilai-nilai, norma dan sikap. 	Skala Likert
2.	Sistem	Sistem Pengendalian	1. Struktur organisasi	Skala Likert

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
	Pengendalian Internal (SPI)	Internal organisasi adalah proses yang mengendalikan praktik akuntansi untuk memenuhi tujuan pengendalian internal, pelaporan, dan pemantauan. Mekanisme pengendalian internal yang dimaksud dapat memfasilitasi pemahaman tentang batasan dan hak yang terkait dengan pekerjaan, serta teknologi informasi yang digunakan, oleh departemen sumber daya manusia (Rahmi Ramadhani dkk., 2023).	<p>yang merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit organisasi untuk melaksanakan tugas pokoknya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang merupakan tanggung jawab perlindungan yang cukup oleh pejabat yang menyetujui terjadinya transaksi terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. 3. Praktik yang sehat yaitu melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 4. Karyawan yang memiliki mutu sesuai dengan tanggung jawabnya. 	
3.	Perencanaan Anggaran	Perencanaan anggaran merupakan sebuah proses antara tujuan dan realisasi dengan menjadi kompas yang mengarahkan seluruh proses perencanaan yang matang dan terstruktur. Perencanaan anggaran merupakan dukungan anggaran yang dipengaruhi oleh aturan, anggaran, perencanaan anggaran,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Umum Akuntansi (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sudah sesuai dengan rencana strategi SKPD, Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang 	Skala Likert

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
		sumber daya manusia, dan pembelian barang dan jasa (Kuntadi dan Adi Nugroho 2023).	RKPD). 2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. 3. Kesesuaian program kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dengan standar harga barang dan jasa. 4. Keseuaian APBD yang ditetapkan dengan RKA SKPD yang diusulkan.	
4.	Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan barang dan jasa merupakan proses penggunaan anggaran yang sudah dijadwalkan secara terencana dalam pemanfaatan anggaran dengan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan (Weni Febriani 2023).	1. Kepatuhan hukum adanya proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. 2. Transparansi proses pengadaan bersifat transparan dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. 3. Efisiensi waktu yang dibutuhkan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan target yang ditetapkan. 4. Pengadaan berkelanjutan yang dirancang untuk	Skala Likert

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
			mendukung prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial organisasi.	
5.	Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja	Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan evaluasi sejauh mana anggaran digunakan untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan sehingga penerapan anggaran mempengaruhi seberapa banyak uang yang digunakan (Kuntadi dan Adi Nugroho 2023).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Output dan outcome yang menilai hasil atau dampak yang dicapai sebagai akibat dari penggunaan anggaran. 2. Capaian kinerja yang mengukur sejauh mana organisasi atau proyek mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam anggaran. 3. Pencapaian sasaran strategis yang menilai sejauh mana penggunaan anggaran mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. 	Skala Likert
6.	Penyerapan Anggaran	Penyerapan anggaran adalah kemampuan pemerintahan daerah mewujudkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Salwah, (2019).	Persentase realisasi terhadap belanja pada masing-masing SKPD.	Rasio Efektivitas

Sumber : Data Diolah (2024)

2.9 Hipotesis

Penyerapan anggaran adalah kemampuan Pemerintah Daerah mewujudkan program dan kegiatan dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila realisasi anggaran sesuai dengan aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan, dengan anggapan bahwa aktual fisik pekerjaan tersebut relatif sama dengan target penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan. Penyerapan anggaran tidak hanya diukur berdasarkan seberapa besar anggaran yang ditetapkan, tetapi juga mengukur efisiensi dan efektivitas anggaran tersebut (Safpremi dkk, 2022).

Rendahnya tingkat pencapaian penyerapan anggaran berdampak kepada perekonomian nasional, antara lain efektivitas alokasi belanja yang ditujukan untuk pembangunan negara menjadi tidak tepat sasaran yang berdasarkan kepada indikator keberhasilan yang ditetapkan. Ketidaktepatan sasaran penyerapan anggaran akan berakibat hilangnya manfaat belanja, karena dana yang telah dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan.

2.9.1 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan

Anggaran Berbasis Kinerja

Komitmen organisasi merupakan sebuah keterikatan seseorang secara psikologi terhadap organisasi (Moh. Nasih, 2018). Komitmen organisasi lebih menunjukkan pada kewajiban moral seorang pegawai terhadap organisasi dengan adanya pertanggungjawaban atas pekerjaannya. Selain itu komitmen organisasi juga menjadi wadah bagi pegawai untuk mengembangkan potensi yang dimiliki

oleh setiap pegawai dengan melakukan pelatihan maupun investasi dalam melakukan pengembangan sumber daya.

Teori manajemen kinerja merupakan suatu hal yang menekankan bahwa pentingnya penyusunan rencana setrategi, menyusun rencana kerja, melakukan evaluasi, penilaian kinerja, monitoring dan evaluasi untuk mengalokasikan sumber daya dalam pengukuran pencapaian tujuan organisasi (Widhiyanti dan Pasaribu, 2020). Ketika pegawai memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi maka mereka akan mengidentifikasi nilai dan tujuan individual mereka dengan nilai dan tujuan organisasi, sehingga mereka akan terlibat aktif dan berperilaku yang menguntungkan organisasi Kuntadi dan Velayati, (2022). Bahkan ketika terjadi perubahan transformasional yang mengubah nilai-nilai dasar organisasi, pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi akan tetap mendukung perubahan tersebut dan berperilaku positif. Jika dikaitkan dengan kinerja organisasional, secara normatif, munculnya komitmen organisasi yang tinggi akan menimbulkan tingkat retensi yang tinggi sehingga kinerja organisasional diharapkan meningkat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk., (2020) komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunari dan Biduri, (2024) menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap efektivitas penerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja

2.9.2 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Perencanaan anggaran dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, dengan menentukan urutan dalam memperhitungkan sumber daya yang ada. Dalam *value for money theory* perencanaan anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran. Perencanaan anggaran memberikan konsep untuk mengukur efisiensi, efektivitas dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya. Semakin matang perencanaan yang dilakukan maka program/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai (Gustavo Puluala, 2021). Namun apabila perencanaan program/kegiatan yang kurang matang maka akan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan. Perencanaan yang tidak baik sering menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya sehingga harus dilakukan revisi atau tidak dapat direalisasikan sama sekali. Penelitian Endeng Suwarni dan Farid Ma'ruf, (2018) menemukan bahwa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran adalah lemahnya perencanaan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap dkk, (2020) Anandah dan Aufa, (2023) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar dkk., (2021), Lestari dan Yuliani Laila, (2022), Attamimi dan Lestari,

(2023) menunjukkan hasil bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2 : Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja

2.9.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Salah satu strategi utama yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan desentralisasi dan otonomi daerah adalah melaksanakan proses monitoring dan evaluasi secara rutin dan menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menerapkan prinsip otonomi daerah serta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan.

Sistem pengendalian intern pemerintah seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Kinerja sebuah instansi pemerintah mencerminkan sejauh mana mereka berhasil mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sejalan dengan visi, misi, dan strategi instansi tersebut. Kinerja ini mencerminkan tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (Nisita Rahmani, 2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Nisita Rahmani, (2023) dan Rahmi Ramadhani (2023) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan penelitian

yang dilakukan oleh Taufik, (2013) menyatakan bahwa adanya pengaruh secara langsung dan tidak langsung sistem pengendalian internal terhadap kinerja sektor publik. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3 : Sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja

2.9.4 Pengaruh Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja

Pengadaan barang dan jasa merupakan proses memenuhi kebutuhan untuk menjalankan program pembangunan pemerintah (Safpremi dkk, 2022). Secara mayoritas lambatnya serapan anggaran terjadi karena proses tender yang memakan waktu cukup lama atau berbulan bulan, sehingga pengadaan barang dan jasa yang lama akan mempengaruhi penyerapan anggaran.

Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam value for money theory perlu dikendalikan dengan penerapan internal, audit keuangan, audit kinerja dan evaluasi kinerja eksternal. Sehingga pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesacara efisiensi dalam penggunaan dana dan hasil kinerja yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan sistem penganggaran (Suharnoko, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dan Setiawan, (2019) Safpremi dkk, (2022), Rini Safitri dan Annisa, (2023) Menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Salwah, (2019) dan

Gustavo Puluala, (2021) yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4 : Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja.

2.9.5 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Komitmen organisasi merupakan suatu tingkat kepatuhan atau keyakinan dari sejauh mana seorang pegawai memihak dan terlibat dalam suatu organisasi tertentu yang mempunyai tujuan untuk memelihara keanggotaan dalam organisasinya itu (Lestari dan Laila Yuliani, 2022). Lemahnya penyerapan anggaran pada OPD di Kabupaten Magelang karena kurangnya komitmen organisasi dimana sikap maupun perasaan yang dimiliki oleh individu dalam organisasi tersebut belum memberikan kontribusi yang terbaik untuk memaksimalkan penyerapan anggaran belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Delia dkk (2021), Kuntadi dan Velayati (2022), Gani dkk (2022), menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismid dkk, (2020), Lestari dan Laila Yuliani, (2022) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5 : Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2.9.6 Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.

Perencanaan anggaran merupakan proses penting dalam penyusunan strategi yang akan dilaksanakan secara bertahap dan disertai dengan anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dimasa depan (Safpremi dkk, 2022). Perencanaan anggaran dalam teori *value for money* adalah sebuah konsep yang menekankan pentingnya mendapatkan hasil yang optimal dari setiap pengeluaran anggaran sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, mengukur kinerja, dan mengendalikan biaya. Penilaian implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dimulai dari pelaksanaan kajian Dokumen Anggaran. Sebagaimana tujuan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja yang ingin menunjukkan keterkaitan antara rencana yang dibuat oleh suatu organisasi dengan penganggaran (Suharnoko, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Salwah, (2019), Safpremi dkk, (2022), Safitri dan Annisa, (2023) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Ishak, (2020), Lestari dan Yuliani Laila, (2022), Attamimi dan Lestari, (2023) yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H6 : Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2.9.7 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Penyerapan Anggaran.

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai. Dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dwi Kansah dkk, 2021).

Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan kepercayaan dalam pencapaian tujuan entitas secara efektif dan efisien. Suatu entitas harus menggunakan sistem pengendalian intern untuk melakukan kegiatan operasional entitas. Maka dari itu, sistem pengendalian intern yang baik dalam suatu entitas sebagai salah satu faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk, (2023) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Armyla, (2018) menunjukkan hasil bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap efektivitas penerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H7 : Sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran

2.9.8 Pengaruh Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran

Kegagalan target dalam penyerapan anggaran terkaid pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pemerintah akan berakibat terhadap hilangnya manfaat belanja karena dana yang telah dialokasikan tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Sehingga keterlambatan ini memberikan dampak keterlambatan atas manfaat yang akan diterima (Safpremi dkk, 2022).

Penerapan konsep *Value For Money Theory* dalam pengukuran kinerja organisasi memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat. Manfaat yang diinginkan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Erawan dkk, 2019). Dalam *Value For Money Theory* pengadaan barang dan jasa merupakan proses pengadaan yang memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Delia dkk, (2021) menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Alfarisi, (2017), Sanjaya, (2018) Ramadhani dan Setiawan (2019), Ani (2020) menunjukkan hasil bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H8 : Pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran